

BAB II

PIALA DUNIA FIFA SEBAGAI INSTRUMEN *NATION BRANDING* DAN DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN DI QATAR

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai konteks penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar serta isu pelanggaran HAM yang muncul selama proses persiapannya. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai Piala Dunia sebagai peristiwa olahraga global yang memiliki dimensi politik dan simbolik, serta bagaimana Qatar memposisikan diri sebagai negara tuan rumah dalam ajang tersebut. Selain itu, Bab II juga menyoroti kondisi sosial dan ketenagakerjaan yang melingkupi pekerja migran sebagai kelompok yang sangat terdampak dalam proyek pembangunan berskala besar menjelang Piala Dunia 2022.

2.1 Sepak Bola dan Piala Dunia sebagai Instrumen *Nation Branding* Global

Perkembangan olahraga internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, dan budaya di skala global. Ajang olahraga berskala besar sering kali menjadi ruang bagi negara untuk menampilkan kepentingan serta posisi tertentu di hadapan masyarakat internasional. Berangkat dari pemahaman tersebut, subbab ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sepak bola sebagai bagian dari olahraga dan Piala Dunia serta bagaimana kedua hal tersebut berperan dalam dinamika internasional.

2.1.1 Peran Sepak Bola dalam Pembentukan Citra dan Identitas Negara

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, olahraga semakin dipahami sebagai instrumen penting yang memiliki pengaruh melampaui fungsi

hiburan semata. Olahraga mampu menjadi alat komunikasi lintas budaya, membangun kedekatan antar masyarakat, serta menciptakan wadah interaksi yang netral di tengah perbedaan politik dan ideologi. Melalui berbagai ajang olahraga internasional, negara dapat menjalin kerja sama, mendorong kemajuan, dan menampilkan nilai-nilai yang ingin mereka tampilkan ke tingkat global. Hal ini sejalan dengan pandangan Ban Ki Moon selaku Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan:

"Sport has become a world language, a common denominator that breaks down all the walls, all the barriers. It is a worldwide industry whose practices can have a widespread impact. Most of all, it is a powerful tool for progress and development." (Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General, 2011.)

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa olahraga telah memiliki peranan strategis dalam kehidupan global, tidak hanya sebagai aktivitas hiburan, tetapi juga sebagai sarana yang mampu mendorong kemajuan serta memengaruhi persepsi publik internasional (UN News, 2011). Dalam konteks negara, olahraga seperti sepak bola dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk membangun citra positif dan memperkuat identitas nasional di mata dunia.

Sepak bola pada awalnya hanya berkembang sebagai permainan masyarakat di Eropa, kemudian mengalami proses penyebaran secara luas hingga menjadi olahraga paling populer di dunia saat ini. Dalam perkembangannya, sepak bola telah melekat dalam kehidupan masyarakat global dan berperan dalam membentuk identitas bersama, ikatan emosional, serta hubungan sosial antar kelompok (Kitching, 2015). Tingginya popularitas sepak bola tidak hanya terlihat dari banyaknya kompetisi dan turnamen

yang digelar, tetapi juga dari besarnya jumlah penggemar yang tersebar di hampir seluruh kawasan dunia. Untuk memperlihatkan tingkat popularitas sepak bola secara global, diperlukan data mengenai jumlah penggemarnya dibandingkan dengan olahraga lain. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan perbandingan jumlah penggemar berbagai cabang olahraga di dunia yang menunjukkan bahwa sepak bola merupakan olahraga dengan basis penggemar terbesar secara global.

Tabel 2. 1 Perbandingan Jumlah Penggemar Olahraga

Peringkat	Cabang Olahraga	Jumlah Penggemar	Persebaran Penggemar
1	Sepakbola	3,5 miliar	Eropa, Afrika, Asia, Amerika
2	Kriket	2,5 miliar	Asia, Australia
3	Hoki	2 miliar	Eropa, Afrika, Asia, Australia
4	Tenis	1 miliar	Eropa, Asia, Amerika
5	Voli	900 juta	Eropa, Australia, Asia, Amerika
6	Tenis Meja	850 juta	Eropa, Afrika, Asia, Amerika
7	Basket	800 juta	Amerika, Oseania, Timur Tengah
8	Bisbol	500 juta	Amerika, Jepang
9	Rugbi	475 juta	Osenia, Afrika Selatan, Inggris
10	Golf	450 juta	Amerika, Oseania, Eropa

Sumber: WorldAtlas, 2025.

Tingginya jumlah peminat sepak bola dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya menjadikan sepak bola tidak hanya berfungsi sebagai sebuah aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai alat strategis yang berperan penting di panggung global. Sepak bola dalam hubungan internasional dapat dipahami sebagai ruang interaksi non-

formal antar aktor yang mampu membentuk persepsi publik internasional melalui simbol, emosi kolektif, dan representasi budaya (Burmalaqui, 2021). Sepak bola memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional dengan menyediakan simbol kolektif yang dapat diterima antar kelas dalam struktur sosial yang ada. Proses ini menunjukkan bagaimana sepak bola berfungsi sebagai ruang penyampaian identitas, dimana keberhasilan olahraga dianggap sebagai keberhasilan nasional (Benouzekri, 2024).

Brazil merupakan contoh paling menonjol dalam pembentukan identitas nasional melalui sepak bola. Sepak bola di Brazil tidak hanya menunjukkan prestasi olahraga, tetapi juga dipahami sebagai ekspresi budaya nasional yang menekankan kreativitas, kebebasan, dan kebahagiaan masyarakatnya. Identitas ini kemudian dibangun dengan konsisten melalui banyaknya prestasi internasional dan narasi media secara lokal maupun lokal, sehingga Brazil dikenal sebagai negara dengan keunggulan sepak bola dunia. Dalam kerangka *nation branding*, sepak bola menjadi aset nasional yang memperkuat citra Brazil sebagai negara dengan identitas budaya yang kuat dan mudah dikenali (Penfold, 2019).

Sepak bola memiliki peran sentral dalam pembentukan citra dan identitas negara dalam konteks hubungan internasional. Melalui fungsi simbolik, diplomatik, dan kulturalnya, sepak bola menjadi alat strategis bagi negara untuk membangun narasi tentang dirinya di hadapan publik domestik dan internasional. Oleh karena itu, memahami sepak bola sebagai instrumen pembentukan identitas dan citra negara

menjadi penting untuk menganalisis bagaimana olahraga berperan dalam dinamika kekuasaan global dan sebagai alat pencitraan suatu negara.

2.1.2 Piala Dunia sebagai *Mega Sporting Event* dalam Panggung Global

Dewasa ini, dunia mengenal beragam perhelatan olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, hingga Piala Dunia yang dikenal dengan sebutan *Mega Sporting Event* (MSE) dan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam panggung global karena dianggap mampu menyita perhatian masyarakat (Amis, 2013). Dalam konteks tersebut, Piala Dunia FIFA dapat dipahami sebagai sebuah turnamen sepak bola internasional yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA), yaitu organisasi internasional yang bertanggung jawab atas cabang olahraga sepak bola pada skala global. Piala Dunia FIFA diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan mempertemukan tim nasional dari berbagai negara lintas benua (FIFA, 2025).

Dalam kajian akademik, Piala Dunia tidak hanya dipahami sebagai kompetisi olahraga, namun juga sebagai sebuah *event* berskala global yang melibatkan negara menjadi aktor utama, baik sebagai peserta maupun sebagai tuan rumah. Skala penyelenggaraan, besarnya liputan media, serta keterlibatan audiens internasional menjadikan Piala Dunia sebagai salah satu perhelatan olahraga terbesar dan paling berpengaruh di dunia (Boyle & Haynes, 2017). Secara historis, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 dan sejak saat itu terus mengalami perkembangan signifikan, baik dari jumlah peserta hingga nilai yang dibawa. Perkembangan tersebut juga tercermin melalui tingkat kehadiran penonton langsung di

stadion pada setiap edisi Piala Dunia yang menunjukkan besarnya daya tarik dan skala penyelenggaraan turnamen ini. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah penonton Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930 sebagai gambaran untuk melihat masifnya perkembangan daya tarik sepak bola.

Tabel 2. 2 Jumlah Total Penonton Langsung Piala Dunia

Tahun Penyelenggaraan	Negara Tuan Rumah	Total Penonton di Stadion	Rata-rata Penonton per Pertandingan
2018	Russia	3.031.768	47.371
2014	Brasil	3.441.450	53.772
2010	Afrika Selatan	3.167.984	49.499
2006	Jerman	3.367.000	52.609
2002	Korea-Jepang	2.724.604	42.571
1998	Prancis	2.859.234	44.676
1994	Amerika Serikat	3.568.567	68.626
1990	Italia	2.527.348	48.411
1986	Meksiko	2.407.431	46.297
1982	Spanyol	1.856.277	35.698
1978	Argentina	1.610.215	42.374
1974	Jerman	1.774.022	46.685
1970	Meksiko	1.673.975	52.312
1966	Inggris	1.614.677	50.459
1962	Chile	776.000	24.250
1958	Swedia	868.000	24.800
1954	Swiss	943.000	36.269
1950	Brazil	1.337.000	60.773
1938	Prancis	483.000	26.833
1934	Italia	395.000	23.235
1930	Uruguay	434.000	24.139

Sumber: Statista, 2018.

Melalui data yang tersaji dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pertandingan Piala Dunia memang seringkali mampu menarik perhatian masyarakat secara global,

terkhusus bagi para penggemarnya. Data di atas hanya menunjukkan penonton yang menghadiri turnamen secara langsung pada stadion yang memiliki batasan kapasitas dan belum mencakup penonton yang menyaksikan melalui siaran media. Kenyataannya, Piala Dunia tidak hanya diminati secara fisik di arena pertandingan, tetapi juga dinikmati oleh khalayak global dalam jumlah yang jauh lebih besar melalui media siaran televisi dan *platform* digital. Menurut laporan resmi FIFA untuk Piala Dunia 2018 di Rusia, sekitar 3,5 miliar penonton di seluruh dunia menyaksikan setidaknya sebagian dari turnamen tersebut melalui siaran televisi, digital, atau fasilitas publik (FIFA, 2018). Selain itu, pertandingan final edisi tersebut menarik sekitar 1,12 miliar penonton secara global, adanya hal ini tentu mencerminkan bahwa Piala Dunia merupakan fenomena media dengan skala perhatian yang luar biasa besar di seluruh dunia (CNN, 2018).

Selain itu, Piala Dunia juga menempati posisi penting karena berada di bawah tata kelola global FIFA yang memiliki otoritas untuk mengatur penyelenggaraan, menentukan standar, serta membangun kerangka kerja yang menghubungkan kepentingan negara, sponsor, dan media internasional. Dalam konteks ini, Piala Dunia menjadi ruang pertemuan antara kepentingan olahraga, diplomasi, dan komunikasi global yang menjadikannya relevan dalam kajian hubungan internasional (Boyle & Haynes, 2017). Dengan karakteristik tersebut, Piala Dunia dapat dipahami sebagai *mega sporting event* yang memiliki posisi strategis dalam sistem internasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Piala Dunia dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana perhelatan olahraga berskala global dapat relevan dengan

dinamika hubungan internasional, khususnya dalam konteks peran negara dan aktor global di luar kerangka politik formal.

2.1.3 Praktik *Nation Branding* melalui Piala Dunia

Dengan peranan strategis yang dimiliki oleh Piala Dunia, maka tak heran apabila turnamen ini kerap dimanfaatkan oleh negara tuan rumah sebagai sarana untuk membentuk dan memperkuat citra nasional di panggung internasional. Melalui Piala Dunia, negara berupaya menampilkan narasi tertentu mengenai dirinya, mulai dari stabilitas politik, kapasitas pembangunan, keterbukaan sosial, hingga identitas budaya (Pillay & Salo, 2010). Salah satu keberhasilan praktik *nation branding* melalui Piala Dunia terlihat menonjol pada penyelenggaraan Piala Dunia 2006 di Jerman. Penyelenggaraan turnamen ini sering dipandang sebagai titik balik dalam citra internasional Jerman pasca-Perang Dingin. Pada awalnya, Jerman kerap diasosiasikan dengan stereotip sebagai negara yang kaku, serius, dan kurang ekspresif secara sosial. Namun, selama Piala Dunia 2006, Jerman berhasil menampilkan citra yang lebih hangat dan terbuka (Brenke & Wagner, 2006). Sejumlah kajian mencatat bahwa Piala Dunia 2006 berkontribusi pada pelunakan citra Jerman dan peningkatan daya tariknya sebagai destinasi wisata serta mitra internasional, menjadikannya salah satu contoh keberhasilan praktik *nation branding* melalui olahraga (Grix, 2012).

Keberhasilan serupa juga tampak pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang memiliki dimensi simbolik dan politis lebih kompleks dibandingkan dengan Jerman. Sebagai negara pertama di benua Afrika yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, Afrika Selatan menghadapi keraguan yang dari komunitas internasional, terutama terkait isu

keamanan, kapasitas infrastruktur, dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, Piala Dunia 2010 dimanfaatkan secara strategis oleh pemerintah Afrika Selatan sebagai sarana untuk menantang narasi Afro-pesimisme dan membangun citra negara yang mampu, modern, serta layak menjadi bagian dari sistem global (Saudi, 2015). Melalui pembangunan infrastruktur berskala besar, pengelolaan keamanan yang baik, serta kampanye simbolik yang menekankan persatuan nasional, Afrika Selatan berupaya memperlihatkan transformasi pasca-apartheid kepada dunia internasional melalui perhelatan Piala Dunia (Knott et al., 2013).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia 2010 berhasil meningkatkan visibilitas global Afrika Selatan dan memperkuat persepsi positif terhadap masyarakatnya, khususnya dalam aspek keramahan, keberagaman budaya, dan kemampuan organisasi (Knott et al., 2013). Media internasional selama turnamen banyak menyoroti keberhasilan Afrika Selatan dalam menyelenggarakan acara kelas dunia, hal ini kemudian meningkatkan aspek kebanggaan nasional sebagai representasi Afrika di panggung global. Sehingga, Piala Dunia 2010 sering dinilai sebagai keberhasilan *nation branding* secara simbolik yang signifikan, terutama dalam menggeser opini internasional dari ketidakmampuan menjadi cukup berkapasitas dengan kepercayaan diri nasional (Pillay & Salo, 2010).

Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa Piala Dunia tidak selalu membawa dampak positif bagi negara tuan rumah. Keberhasilan dalam membangun citra sangat bergantung pada konteks domestik, kesiapan, serta kemampuan negara tuan rumah dalam mengelola ekspektasi global. Biaya penyelenggaraan yang sangat

besar, isu pengusuran, ketimpangan sosial, hingga kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat justru memperburuk citra negara apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa kasus, sorotan media internasional terhadap kontroversi selama persiapan dan pelaksanaan Piala Dunia justru menegaskan sisi negatif negara tuan rumah, sehingga mengurangi efektivitas *nation branding* yang diharapkan (Benouzekri, 2024). Dengan demikian, Piala Dunia dapat dipahami sebagai instrumen negara di panggung internasional yang memiliki dua mata pisau, yakni berpotensi menghasilkan keuntungan reputasional, namun juga mengandung resiko bagi negara.

2.2 Qatar sebagai Negara Tuan Rumah Piala Dunia 2022: Konteks

Sosial, Politik, dan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 telah menempatkan Qatar dalam sorotan dunia yang tidak hanya berkaitan dengan prestasi olahraga, tetapi juga kondisi domestik negara tersebut. Aspek sosial, politik, dan ketenagakerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan Piala Dunia serta narasi pembangunan yang ingin ditampilkan Qatar. Maka dari itu, subbab ini membahas mengenai Qatar sebagai subjek utama dalam penelitian ini serta untuk meninjau konteks sosial, politik, dan ketenagakerjaan yang melingkupi negara tersebut.

2.2.1 Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022

Qatar merupakan negara monarki yang terletak di kawasan Teluk Persia dengan karakteristik wilayah geografis yang tergolong kecil namun memiliki kapasitas ekonomi yang kuat. Struktur pemerintahan Qatar bersifat terpusat dengan kekuasaan

utama berada di tangan Emir, sehingga segala kebijakan cenderung bersifat terarah dan terkontrol oleh pusat (Suherli et al., 2022). Secara ekonomi, Qatar bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam yang selama ini menjadi fondasi utama pertumbuhan nasional dan stabilitas ekonomi negara (Lloyd Bank, 2025). Pendapatan dari sektor sumber daya tersebut mendorong masifnya pembangunan infrastruktur, modernisasi kawasan, serta peningkatan peran negara dalam berbagai sektor strategis. Dalam konteks hubungan internasional, Qatar juga dikenal sebagai negara yang aktif memperluas perannya di tingkat regional dan global melalui diplomasi, investasi, serta keterlibatan dalam berbagai forum internasional, meskipun secara geografis dan demografis tergolong sebagai negara kecil (IMO Qatar, n.d.).

Gambar 2. 1 Letak Geografis Negara Qatar



Sumber: BBC, 2023.

Sejak secara resmi ditetapkan oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar mendapatkan eksposur internasional dan namanya menjadi lebih dikenal oleh

masyarakat secara luas. Penetapan ini menandai sebuah titik penting dalam perjalanan Qatar sebagai negara yang secara aktif berupaya meningkatkan visibilitas dan pengakuannya di panggung global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia diselenggarakan di kawasan Timur Tengah, sehingga posisi Qatar tidak hanya dipahami sebagai penyelenggara teknis sebuah turnamen olahraga, tetapi juga sebagai representasi kawasan yang selama ini relatif jarang menjadi pusat perhatian dalam *mega sporting event* berskala dunia (BBC, 2022).

Keinginan Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari strategi negara agar dapat membangun identitas dan citra internasional. Sebelum pencalonan resminya, Qatar telah secara konsisten memperluas keterlibatannya dalam dunia olahraga internasional melalui penyelenggaraan berbagai ajang olahraga berskala regional maupun global. Upaya ini dilakukan untuk menunjukkan kapasitas negara dalam aspek teknis, logistik, dan organisasi, sekaligus membangun kepercayaan dari komunitas olahraga internasional terhadap kemampuan Qatar sebagai tuan rumah (Brannagan & Giulianotti, 2014).

Proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dilakukan melalui mekanisme penawaran (*bidding*) resmi FIFA dalam rentang waktu 2009–2010. Dalam proses ini, negara-negara kandidat wajib menyerahkan proposal yang mencerminkan kesiapan mereka dalam menyelenggarakan turnamen sepak bola berskala global. Melalui Qatar Football Association (QFA), Qatar mengajukan proposal yang menekankan kesiapan negara secara menyeluruh, mulai dari dukungan penuh pemerintah, rencana pembangunan infrastruktur olahraga dan non-olahraga, hingga

komitmen pembiayaan jangka panjang guna menjamin keberlanjutan penyelenggaraan turnamen (FIFA, n.d.-b). Untuk memperjelas tahapan *bidding* yang dilewati, tabel di bawah ini menyajikan kronologi utama proses yang dilalui Qatar sejak pendaftaran penawaran hingga penunjukan resmi sebagai tuan rumah oleh FIFA.

Tabel 2. 3 Kronologi *Bidding Process* Piala Dunia FIFA 2022 Qatar

No.	Tanggal	Tahapan Proses
1.	16 Maret 2009	Pendaftaran proposal penawaran Asosiasi Sepak Bola Qatar (Qatar Football Association/QFA) untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022.
2.	18 September 2009	Pembentukan Komite Penawaran (Bid Committee) Qatar sebagai badan yang bertanggung jawab atas proses bidding.
3.	11 Desember 2009	Penandatanganan Perjanjian Penawaran (Bidding Agreement) antara QFA dan FIFA.
4.	14 Mei 2010	Penyerahan dokumen penawaran resmi Piala Dunia FIFA 2022 oleh Qatar kepada FIFA.
5.	13–17 September 2010	Kunjungan inspeksi FIFA ke Qatar sebagai bagian dari proses evaluasi kandidat tuan rumah.
6.	2 Desember 2010	Penunjukan resmi Qatar sebagai negara tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 oleh Komite Eksekutif FIFA.

Sumber: FIFA, 2010: 3.

Setelah melalui rangkaian tahapan administratif dan kelembagaan sebagaimana tercatat dalam tabel kronologi di atas, proses penawaran Qatar juga ditandai oleh penyampaian konsep penyelenggaraan turnamen yang menjadi bagian penting dari dokumen penawaran resmi kepada FIFA. Dalam proposal tersebut, Qatar mengajukan pendekatan yang relatif berbeda dibandingkan kandidat lainnya, yaitu *compact hosting concept*. Konsep ini menekankan penempatan seluruh stadion dan fasilitas utama penyelenggaraan Piala Dunia dalam radius geografis yang saling berdekatan. Melalui

konsep tersebut, Qatar menawarkan peningkatan efisiensi mobilitas antar lokasi pertandingan, pengurangan waktu tempuh, serta optimalisasi penggunaan infrastruktur transportasi. Selain itu, pendekatan ini juga dipresentasikan sebagai strategi untuk menekan biaya operasional dan meminimalkan dampak lingkungan yang kerap dikaitkan dengan penyelenggaraan turnamen berskala besar (Talaoui, 2025).

Dalam dinamika *bidding* tersebut, posisi Qatar tidak dapat dilepaskan dari posisinya dengan negara-negara pesaing, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang secara historis memiliki pengalaman lebih panjang dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola internasional (Al Jazeera, 2010). Negara-negara tersebut pada awalnya lebih diunggulkan sebagai kandidat kuat karena infrastruktur yang telah mapan serta tradisi sepak bola yang lebih mengakar. Di tengah persaingan tersebut, Qatar menempatkan dirinya bukan sebagai negara dengan sejarah sepak bola yang unggul dan lebih baik, melainkan sebagai negara dengan kemampuan ekonomi, stabilitas politik, dan komitmen negara yang tinggi untuk menghadirkan Piala Dunia di wilayah baru (Morris, 2012).

Perbedaan pendekatan yang digunakan Qatar telah menciptakan dinamika tersendiri dalam proses *bidding*, di mana Qatar menawarkan narasi ekspansi geografis Piala Dunia ke kawasan Timur Tengah, sementara kandidat lain lebih menonjolkan aspek pengalaman dan kesiapan historis. Dengan melakukan pendekatan yang lebih unik tersebut, Qatar akhirnya berhasil mengungguli negara pesaingnya untuk mendapatkan titel negara tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan perolehan pemungutan suara *committee* FIFA sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Hasil Pemungutan Suara FIFA

Negara Calon Tuan Rumah	Putaran 1	Putaran 2	Putaran 3	Putaran Final
Qatar	11	10	11	14
Amerika Serikat	3	5	6	8
Korea Selatan	4	5	5	Tereliminasi
Jepang	3	2	–	Tereliminasi
Australia	1	–	–	Tereliminasi

Sumber: Jackson, 2010.

Dengan kemenangan Qatar dalam proses *bidding* tersebut, dapat dilihat bahwa proses *bidding* Piala Dunia 2022 tidak hanya mencerminkan kompetisi teknis antarnegara, tetapi juga memperlihatkan kontestasi visi mengenai arah pengembangan sepak bola global dan peran negara-negara dalam struktur olahraga internasional (FIFA, n.d.).

Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 juga mencerminkan dinamika perubahan dalam tata kelola sepak bola global, di mana FIFA berupaya memperluas jangkauan geografis turnamen ke wilayah-wilayah baru. Dalam konteks ini, Qatar diposisikan sebagai negara yang mampu merepresentasikan ekspansi tersebut, sekaligus menawarkan narasi baru tentang penyelenggaraan Piala Dunia di luar pusat-pusat tradisional sepak bola dunia. Hal ini memberikan makna simbolik bagi Qatar sebagai negara kecil yang berhasil menembus struktur global melalui ajang olahraga internasional (Izzah, 2024). Melalui penyelenggaraan Piala Dunia 2022, Qatar menempatkan dirinya sebagai aktor negara yang aktif membentuk narasi dan perannya sendiri di panggung internasional.

2.2.2 Kondisi Politik, Sosial dan Ketenagakerjaan di Qatar

Secara politik, Qatar merupakan negara monarki dengan sistem pemerintahan yang tersentralisasi, di mana kekuasaan negara berada di tangan Emir sebagai pemimpin tertinggi. Sistem ini terbentuk dari sejarah panjang kekuasaan dinasti Al Thani yang mulai menguat sejak pertengahan abad ke-19. Sejak periode tersebut, pola pemerintahan di Qatar berkembang dengan menempatkan otoritas politik penguasa monarki, sementara institusi negara berfungsi untuk mendukung dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan (Feiler & Zeev, 2017). Pada masa protektorat Inggris, struktur monarki tetap dipertahankan karena dinilai mampu menjaga stabilitas politik. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971, Qatar melanjutkan sistem monarki tersebut dengan membangun lembaga-lembaga pemerintahan modern, seperti Dewan Menteri dan kementerian-kementerian lainnya (MOFA Qatar, n.d.). Meskipun demikian, pengambilan keputusan utama tetap terpusat pada Emir, sehingga arah kebijakan negara, termasuk di bidang pembangunan, sosial, dan ketenagakerjaan, ditentukan secara terkoordinasi pada tingkat pusat.

Dalam kerangka politik tersebut, Qatar tidak menerapkan sistem demokrasi liberal sebagaimana yang berkembang di kebanyakan negara demokratis lain. Partisipasi politik warga negara disalurkan melalui bentuk perwakilan yang terbatas dan bersifat konsultatif yang berfungsi sebagai ruang penyampaian pandangan masyarakat kepada negara. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan proses pemerintahan tetap berjalan tanpa adanya gejolak politik yang terbuka. Oleh karena itu, legitimasi politik pemerintahan monarki di Qatar tidak

bergantung pada dijalankannya sistem elektoral, melainkan pada kemampuan negara dalam menyediakan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi bagi warganya (Baabood, 2017). Pola ini membentuk hubungan yang relatif stabil antara negara dan masyarakat, di mana kepatuhan politik berjalan seiring dengan peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keteraturan sosial.

Kondisi sosial di Qatar juga dipengaruhi oleh dinamika demografis yang unik, dimana Qatar memiliki proporsi penduduk non-warga negara yang sangat besar dibandingkan warga negara asli Qatar. Sebuah laporan pada tahun 2025 menyatakan bahwa angka penduduk migran di Qatar mencapai tingkat yang luar biasa tinggi, yaitu mencapai 2,76 juta jiwa. Sedangkan, penduduk asli Qatar hanya berkisar 360 ribu jiwa (GMI, 2025). Komposisi demografis tersebut berimplikasi langsung pada besar struktur pasar tenaga kerja, terutama dalam hal perbandingan antara tenaga kerja warga negara Qatar dan non-Qatari. Untuk menggambarkan kondisi tersebut secara lebih konkret, tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja antara warga negara Qatar dan non-Qatari selama periode 2015–2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Qatar (2015-2023)

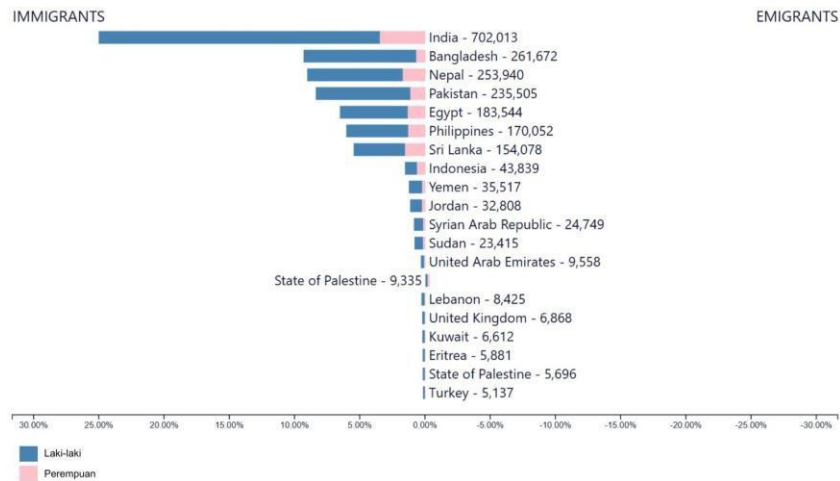
Tahun	Qatari (Total)	Non-Qatari (Total)	Total Angkatan Kerja
2015	52,1	92,1	88,6
2016	52,4	92,5	89,1
2017	52,2	91,8	88,4
2018	52,2	91,7	88,3
2019	52,4	91,5	88,2

2020	51,5	91,5	88,0
2021	54,2	90,8	87,4
2022	54,3	90,8	87,4
2023	54,4	91,1	87,7

Sumber: National Planning Council (NPC) Qatar, 2023.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, terlihat perbedaan yang konsisten antara tingkat partisipasi angkatan kerja warga negara Qatar dan non-Qatari sepanjang tahun 2015–2023. Tingkat partisipasi tenaga kerja non-Qatari secara stabil berada di atas 90 persen, sementara tingkat partisipasi warga negara Qatar berada pada kisaran 51–54 persen. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan mencerminkan karakteristik pasar tenaga kerja Qatar yang sangat aktif dan sangat bergantung pada keberadaan tenaga kerja non-nasional. Kondisi tersebut tentunya turut membentuk pola hubungan antara warga negara Qatar dan penduduk non-Qatari yang memiliki perbedaan status hukum serta akses terhadap hak-hak sosial tertentu. Penduduk migran yang tinggal dan bekerja di Qatar berasal dari berbagai negara, terutama dari kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, serta beberapa negara di Timur Tengah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data statistik mengenai negara asal penduduk migran di Qatar beserta kuantitasnya.

Gambar 2. 2 Negara Asal Penduduk Migran di Qatar



Sumber: Population Pyramid, 2020.

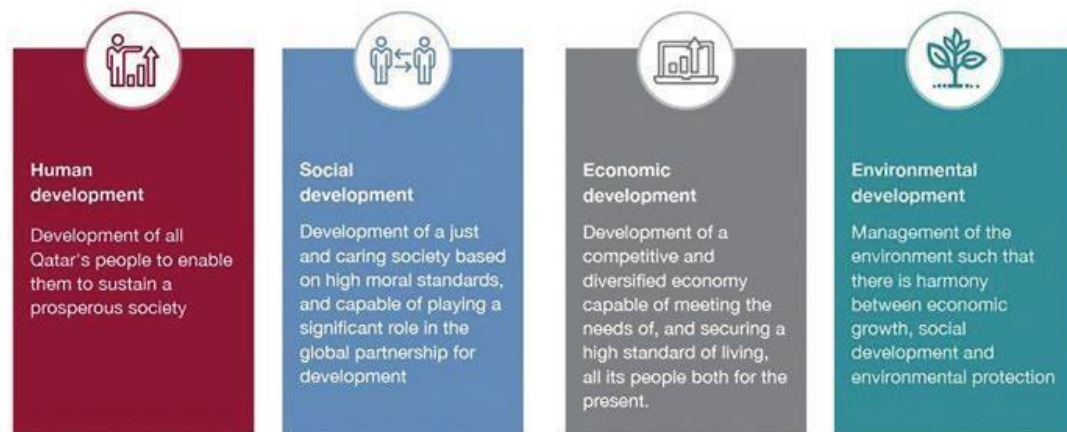
Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa pekerja migran di Qatar didominasi oleh individu yang berasal dari negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan Filipina. Dominasi pekerja migran dari negara-negara tersebut mencerminkan bahwa ketergantungan Qatar terhadap tenaga kerja asing telah terbangun secara terstruktur dan berlangsung dalam jangka panjang, terutama untuk menunjang sektor-sektor ekonomi utama. Keberadaan populasi migran dalam jumlah besar dan dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam ini tidak hanya memengaruhi struktur pasar tenaga kerja, tetapi juga membentuk dinamika sosial yang lebih luas di dalam masyarakat Qatar. Meskipun warga negara Qatar menyadari ketergantungan ekonomi terhadap tenaga kerja asing, terdapat kekhawatiran yang kuat terkait pelestarian budaya dan identitas nasional yang dapat turut terkikis karena masifnya jumlah pendatang (Al-Khelaifi et al., 2025).

Kebijakan ketenagakerjaan di Qatar juga mengalami dinamika dan perubahan tertentu, terutama dalam dekade terakhir yang dipengaruhi oleh tekanan internasional

dan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik ketenagakerjaan modern (Diop et al., 2024). Meskipun sistem ketenagakerjaan tradisional di negara-negara GCC, termasuk Qatar, telah menggunakan mekanisme tertentu untuk mengelola arus migrasi dan hubungan kerja, terdapat transformasi kebijakan yang menunjukkan adanya upaya penyesuaian dengan standar internasional dalam beberapa aspek. Dalam konteks ini, terdapat upaya untuk mereformasi kebijakan migrasi dan hubungan kerja sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi dan perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan di Qatar berkembang dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang berkaitan dengan struktur pasar tenaga kerja yang sangat bergantung pada pekerja migran (Aref, 2021).

Kondisi politik, sosial, dan ketenagakerjaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan nasional yang dirumuskan negara melalui Qatar National Vision 2030 (QNV 2030). Dokumen ini disusun sebagai rencana langkah untuk menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang di Qatar, termasuk perubahan struktur ekonomi, dinamika demografi akibat arus migrasi, serta keterlibatan yang semakin intens dalam sistem global. QNV 2030 berfungsi sebagai kerangka strategis yang mengarahkan transformasi negara menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui integrasi empat pilar utama, yaitu pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ministry of Development Planning and Statistics, 2015). Melalui visi ini, pembangunan nasional tidak hanya dipahami sebagai peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga sebagai proses untuk peningkatan mutu sosial dan institusional secara terencana.

Gambar 2. 3 Pilar Qatar *National Vision* 2030



Sumber: Al-Tamimi et al., 2023.

Sebagai kerangka pembangunan yang bersifat terpusat dan jangka panjang, QNV 2030 memiliki peran yang krusial dalam membentuk arah kebijakan publik, termasuk kebijakan ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga kerja migran. Narasi pembangunan yang terkandung dalam QNV 2030 menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan nasional, sekaligus menjadi dasar untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis (Al Suwaidi, 2018). Dalam konteks ini, kebijakan ketenagakerjaan dan relasi kerja yang berkembang di Qatar beroperasi dalam kerangka pembangunan nasional yang menekankan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial sebagai bagian dari pilar rencana pembangunan nasional tersebut.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Qatar telah lebih dahulu memanfaatkan ajang olahraga internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan dan peningkatan visibilitas negara bahkan sebelum penunjukan sebagai tuan rumah

Piala Dunia FIFA 2022 pada tahun 2010. Salah satu contohnya adalah Asian Games 2006 yang juga mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur olahraga dan fasilitas perkotaan dalam skala besar. Proyek-proyek tersebut melibatkan tenaga kerja migran dalam jumlah signifikan, dan beberapa laporan pada periode tersebut telah menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti kondisi kerja yang berat, keterikatan pekerja pada sistem kafala, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum (Human Rights Watch, 2006). Namun demikian, perhatian internasional terhadap isu tersebut masih terbatas karena skala pembangunan yang terjadi belum sebesar proyek yang dipicu oleh penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Berbeda dengan Asian Games yang bersifat regional, Piala Dunia FIFA memiliki visibilitas global yang jauh lebih luas sehingga memicu sorotan internasional yang lebih intens terhadap kondisi pekerja migran di Qatar.

Secara keseluruhan, kondisi sosial, politik, dan ketenagakerjaan di Qatar mencerminkan struktur kenegaraan yang ditandai oleh pemerintahan monarki yang stabil dan terpusat, komposisi demografis yang sangat bergantung pada pekerja migran, serta kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam QNV 2030 (Al-Tamimi et al., 2023). Konteks domestik Qatar tersebut membentuk landasan penting untuk memahami dinamika ketenagakerjaan dan relasi sosial yang berkembang di negara tersebut, terutama dalam kaitannya dengan peran negara dalam mengatur pasar tenaga kerja dan menjalankan agenda pembangunan nasional. Pemahaman terhadap konteks ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik

ketenagakerjaan dijalankan selama masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang lebih luas.

2.3 Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran dalam Persiapan Piala Dunia Qatar 2022.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa penyelenggaraan Piala Dunia FIFA tidak hanya dipahami sebagai ajang olahraga berskala global, tetapi juga sebagai proses pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang kompleks. Sehingga, dalam banyak kasus, percepatan pembangunan yang menyertai penyelenggaraan ajang olahraga internasional menuntut ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Kondisi ini sering kali membawa dampak sosial tertentu, terutama bagi kelompok pekerja yang terlibat secara langsung dalam proyek-proyek pembangunan tersebut. Oleh karena itu, isu hak asasi manusia dalam konteks *mega sporting event* menjadi bagian penting dari perhatian akademik dan diskursus internasional (Henderson, 2017).

Dalam kerangka global, pekerja migran merupakan kelompok yang kerap berada pada posisi rentan dalam proyek pembangunan berskala besar. Kerentanan tersebut umumnya berkaitan dengan status hukum sebagai non-warga negara, keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, serta ketergantungan yang tinggi terhadap pemberi kerja (Ewers et al., 2023). Organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) telah lama menyoroti bahwa pekerja migran menghadapi risiko yang lebih besar terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan,

terutama dalam konteks negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi pada tenaga kerja asing (ILO, 2023). Dalam konteks ini, isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran tidak dipandang sebagai sebuah fenomena yang terisolasi, namun sebagai suatu permasalahan yang sering muncul dalam dinamika pembangunan global.

Pada saat terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dapat dikatakan bahwa Qatar masih belum dianggap siap dari segi infrastruktur (Ward, 2022). Kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan Qatar pada kondisi dimana terdapat pembangunan infrastruktur yang masif dan intensif, mencakup pembangunan stadion, sistem transportasi, fasilitas akomodasi, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Proses pembangunan besar-besaran inipun melibatkan pekerja migran dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai negara, khususnya dari Asia Selatan dan Asia Tenggara (Alfarizi et al., 2023a). Kehadiran pekerja migran dalam skala besar tersebut kemudian menjadi latar belakang munculnya perhatian berbagai pihak terhadap kondisi kerja dan kehidupan mereka selama proses persiapan penyelenggaraan turnamen.

Berbagai laporan dari organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional mencatat sejumlah isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja migran di Qatar selama periode persiapan Piala Dunia. Isu-isu yang sering disoroti meliputi kondisi kerja yang berat, jam kerja yang panjang, risiko keselamatan di tempat kerja, keterlambatan pembayaran upah, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif (Amnesty International, 2016). Selain itu, perhatian juga diarahkan pada aspek kehidupan sosial pekerja migran, seperti kondisi tempat tinggal,

akses terhadap layanan kesehatan, dan keterbatasan ruang untuk mengekspresikan kepentingan mereka secara kolektif (Prakasa, 2022). Temuan-temuan tersebut berkontribusi pada terbentuknya narasi global mengenai tantangan perlindungan hak asasi manusia pekerja migran di negara-negara tujuan kerja.

Diskursus mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di Qatar tidak hanya berkembang melalui laporan organisasi non-pemerintah, tetapi juga melalui berbagai kajian akademik yang menempatkan isu ini dalam konteks pembangunan dan globalisasi. Sejumlah studi menyoroti bahwa percepatan pembangunan yang didorong oleh agenda nasional dan tuntutan internasional sering kali menciptakan tekanan besar terhadap sistem ketenagakerjaan yang ada (Diop et al., 2024). Dalam konteks Qatar, persiapan Piala Dunia 2022 dipandang sebagai momentum yang memperlihatkan secara lebih jelas dinamika antara kebutuhan pembangunan, ketergantungan pada tenaga kerja migran, sistem ketenagakerjaan kafala yang membuat rentan, dan tantangan dalam pemenuhan standar hak asasi manusia (Al Thani, 2021).

Lebih jauh, isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022 juga menjadi bagian dari perbincangan di tingkat internasional mengenai tanggung jawab negara tuan rumah dalam penyelenggaraan suatu perhelatan olahraga dengan skala global. Negara tidak hanya dipandang sebagai aktor pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses pembangunan tersebut tidak mengabaikan hak-hak dasar kelompok manapun (Khan, 2014). Dalam hal ini, Qatar menjadi sorotan karena

posisinya yang dianggap penting dalam aspek ekonomi global, serta perannya sebagai tuan rumah pada ajang yang sangat bergengsi seperti Piala Dunia. Perhatian internasional tersebut menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia pekerja migran telah menjadi elemen penting dalam menilai keberhasilan dan legitimasi penyelenggaraan sebuah *mega sporting event*. Dengan demikian, subbab ini ditulis untuk memperkenalkan isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022 sebagai bagian dari konteks sosial yang lebih luas.

2.4 Respon terhadap Isu Pelanggaran HAM pada Piala Dunia Qatar 2022

Meningkatnya perhatian internasional terhadap isu pelanggaran HAM dalam Piala Dunia Qatar 2022 mendorong munculnya berbagai bentuk kritik dan tekanan dari aktor global. Di sisi lain, FIFA dan Pemerintah Qatar juga menyampaikan respon serta pembelaan atas tuduhan yang berkembang. Maka dari itu, subbab ini akan membahas respon yang muncul terhadap isu pelanggaran HAM, baik dari organisasi internasional, media global, maupun dari FIFA dan Pemerintah Qatar sebagai aktor primer.

2.4.1 Kritik dan Tekanan dari Organisasi Internasional serta Media Global

Isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran dalam konteks persiapan Piala Dunia FIFA 2022 telah memicu perhatian luas dari berbagai aktor internasional. Perhatian tersebut tidak hanya datang dari organisasi hak asasi manusia internasional, tetapi juga dari lembaga advokasi global, forum internasional, serta media dengan jangkauan lintas negara. Dalam konteks penyelenggaraan *mega sporting event*, kritik dan tekanan internasional ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran

global terhadap dimensi sosial dan kemanusiaan yang menyertai proyek pembangunan berskala besar (Amis, 2013). Dengan demikian, isu pekerja migran di Qatar tidak hanya hadir sebagai persoalan domestik semata, melainkan menjadi bagian dari persoalan global terkait dengan hubungan antara pembangunan, tenaga kerja, dan hak asasi manusia.

Organisasi hak asasi manusia internasional menjadi aktor yang paling konsisten dalam menyampaikan kritik terhadap kondisi pekerja migran selama persiapan Piala Dunia 2022. Amnesty International merupakan salah satu organisasi yang secara aktif memproduksi laporan, siaran pers, dan kampanye advokasi yang menyoroti situasi pekerja migran di Qatar (Hapsari, 2022). Dalam berbagai publikasinya, Amnesty International mengakui adanya reformasi ketenagakerjaan yang diumumkan oleh pemerintah Qatar, namun menekankan bahwa implementasi reformasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran secara merata. Amnesty mencatat berbagai persoalan yang dialami pekerja migran, seperti praktik pungutan biaya rekrutmen yang tidak sah, kondisi kerja yang berat, keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan, serta kesulitan memperoleh kompensasi setelah kontrak kerja berakhir (Amnesty International, 2021b).

Kritik yang disampaikan Amnesty International tidak hanya berbentuk evaluasi terhadap kondisi kerja, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Dalam konteks ini, Amnesty International menyoroti peran negara tuan rumah dan organisasi penyelenggara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan normatif untuk memastikan bahwa

pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan hak-hak dasar pekerja migran. Melalui kampanye globalnya, Amnesty International mendorong agar isu pekerja migran dipahami sebagai bagian integral dari keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan sebuah turnamen besar (Amnesty Internasional, 2022).

Selain Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) juga berperan penting dalam membingkai kritik internasional terhadap penanganan isu pekerja migran di Qatar. HRW menerbitkan sejumlah laporan dan pernyataan yang menyoroti kesenjangan antara komitmen yang disampaikan oleh otoritas Qatar dan realitas yang dialami oleh pekerja migran. Dalam laporan-laporannya, HRW mengangkat isu-isu seperti keterlambatan pembayaran upah, praktik kerja yang bersifat eksploitatif, serta lemahnya pemulihan hak bagi pekerja migran setelah proyek-proyek pembangunan selesai. HRW juga mencatat bahwa meskipun terdapat pernyataan optimistis dari FIFA dan pemerintah Qatar mengenai kemajuan reformasi ketenagakerjaan, berbagai persoalan struktural yang dihadapi pekerja migran masih terus dilaporkan bahkan setelah turnamen berakhir (Human Rights Watch, n.d.). Kritik dari HRW menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap Qatar dan FIFA tidak hanya berfokus pada periode sebelum dan selama Piala Dunia, tetapi juga berlanjut pada fase pasca-turnamen. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa tanggung jawab terhadap pekerja migran tidak berhenti pada keberhasilan penyelenggaraan acara, melainkan mencakup konsekuensi jangka panjang dari pembangunan yang telah dilakukan.

Di luar organisasi hak asasi manusia, media global memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyebarluaskan kritik dan tekanan internasional terhadap isu

pekerja migran di Qatar. Media internasional seperti *The Guardian*, *BBC*, dan sejumlah media global lainnya secara rutin memberitakan laporan investigatif, temuan organisasi HAM, serta tanggapan dari berbagai aktor terkait. Pemberitaan media global tidak hanya menyajikan data dan fakta mengenai kondisi kerja pekerja migran, tetapi juga membingkai isu tersebut dalam narasi yang mudah diakses oleh publik internasional. Melalui liputan yang berkelanjutan, media global berkontribusi dalam membentuk opini publik internasional mengenai penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 (Ahmad & Al-Zoubi, 2025).

Sorotan media global juga memperluas jangkauan diskursus isu pekerja migran ke berbagai lapisan masyarakat internasional, termasuk penonton sepak bola, penggemar olahraga, dan komunitas sipil global (Almulla, 2024). Dengan menjadikan isu pekerja migran sebagai bagian dari pemberitaan utama terkait Piala Dunia, media global turut menciptakan tekanan simbolik terhadap aktor-aktor yang terlibat, baik negara tuan rumah maupun organisasi penyelenggara. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai perantara antara laporan organisasi HAM dan reaksi publik internasional, sehingga memperkuat posisi isu hak asasi manusia dalam diskursus global seputar Piala Dunia.

Secara kolektif, kritik dan tekanan yang berasal dari organisasi internasional dan media global menunjukkan bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran telah berkembang menjadi perhatian global yang melibatkan berbagai aktor lintas negara (Amis, 2013). Kritik tersebut tidak hanya menyoroti kondisi aktual yang dialami pekerja migran, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan

tanggung jawab dalam penyelenggaraan *mega sporting event*. Pemaparan mengenai kritik dan tekanan internasional ini memberikan gambaran mengenai bagaimana isu pekerja migran dibingkai dan dibahas di tingkat global, sekaligus menjadi landasan kontekstual untuk memahami dinamika respons yang muncul dari negara tuan rumah dan organisasi penyelenggara.

2.4.2 Respon FIFA dan Pemerintah Qatar terhadap Tuduhan Pelanggaran HAM

Meningkatnya sorotan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses persiapan Piala Dunia FIFA 2022 mendorong munculnya berbagai bentuk respons dari aktor utama yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen tersebut. FIFA sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap turnamen dan Pemerintah Qatar sebagai negara tuan rumah berada dalam posisi strategis sekaligus rentan terhadap tekanan global. Regueiro (2020) menekankan bahwa dalam *mega sporting event*, tanggung jawab atas potensi pelanggaran HAM bersifat terdistribusi dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari organisasi penyelenggara hingga negara tuan rumah. Oleh karena itu, respons yang muncul dari FIFA dan Pemerintah Qatar perlu dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menyikapi tekanan internasional sekaligus mempertahankan posisi dan peran masing-masing dalam sistem global olahraga dan politik internasional.

Sebagai organisasi internasional yang memegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan sepak bola dunia, FIFA menghadapi tekanan yang signifikan untuk merespons berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dikaitkan dengan Piala Dunia 2022. Dalam sejumlah pernyataan dan dokumen kebijakannya, FIFA

menegaskan bahwa isu hak asasi manusia merupakan bagian dari komitmen organisasionalnya, terutama setelah meningkatnya tuntutan global agar organisasi olahraga mengambil peran yang lebih aktif dalam perlindungan HAM. FIFA menyatakan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar telah menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan berbasis tanggung jawab sosial dalam tata kelola turnamen internasional (Ersani et al., 2024).

Lebih lanjut, FIFA telah mengadopsi kerangka normatif yang merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) yang kemudian dituangkan ke dalam FIFA Human rights Policy. Dalam kerangka ini, FIFA menyampaikan komitmennya untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) dalam seluruh proses penyelenggaraan turnamen, termasuk dalam pengawasan terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur (FIFA, 2017). Pendekatan ini digunakan FIFA untuk menunjukkan bahwa organisasi tersebut menyadari implikasi sosial dari aktivitasnya dan berupaya menyesuaikan kebijakan internalnya dengan standar internasional yang berlaku.

Selain itu, FIFA juga menekankan pentingnya konsep *shared responsibility* dalam merespons tuduhan pelanggaran HAM. Dalam narasi ini, FIFA memposisikan dirinya sebagai salah satu aktor dalam jaringan tanggung jawab yang lebih luas, yang mencakup negara tuan rumah, kontraktor, serta aktor ekonomi lainnya. Dengan menekankan pembagian tanggung jawab tersebut, FIFA menyampaikan bahwa perlindungan hak pekerja migran tidak sepenuhnya berada dalam kendali satu aktor

tunggal, melainkan bergantung pada koordinasi dan kerja sama lintas aktor atau institusi (Regueiro, 2020). Pendekatan ini mencerminkan cara FIFA membingkai responsnya terhadap kritik HAM secara institusional dan normatif, tanpa secara langsung mengakui tanggung jawab penuh atas pelanggaran yang dituduhkan .

Di sisi negara tuan rumah, Pemerintah Qatar juga mengembangkan serangkaian respons terhadap meningkatnya kritik internasional terkait isu hak asasi manusia dalam persiapan Piala Dunia 2022. Pada tahap awal, respons pemerintah Qatar cenderung bersifat defensif, dengan menolak sejumlah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilontarkan oleh organisasi internasional dan media global (Askew, 2022). Otoritas Qatar menyatakan bahwa sebagian kritik tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan bahkan dipandang sebagai fitnah terhadap citra negara. Dalam beberapa pernyataan resmi, pemerintah menegaskan bahwa Qatar menjadi sasaran kritik yang tidak proporsional dibandingkan negara lain yang juga mengandalkan tenaga kerja migran dalam pembangunan berskala besar (Reuters, 2021).

Pemerintah Qatar kemudian tidak hanya menanggapi dengan penolakan pengakuan terhadap tuduhan yang dilayangkan, mereka juga mengambil langkah yang lebih positif dengan melakukan transformasi kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan ketenagakerjaan (Ewers et al., 2023). Salah satu bentuk respons paling menonjol dalam fase lanjutan adalah langkah Qatar untuk memperkuat kerja sama dengan International Labour Organization (ILO). Melalui kerja sama teknis yang dimulai pada tahun 2017, Qatar menempatkan agenda reformasi ketenagakerjaan dalam kerangka dialog dengan lembaga internasional yang memiliki legitimasi

normatif di bidang perburuhan. Laporan ILO menunjukkan bahwa pemerintah Qatar menggunakan kerja sama ini sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen terhadap peningkatan standar ketenagakerjaan, termasuk penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa, serta pembaruan regulasi yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja migran (ILO, n.d.).

Secara keseluruhan, respons FIFA dan Pemerintah Qatar terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia memperlihatkan bagaimana isu HAM menjadi bagian integral dari tata kelola *mega sporting event* kontemporer. Literatur menunjukkan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia tidak lagi dipahami semata-mata sebagai peristiwa olahraga, tetapi juga sebagai arena politik dan normatif di mana berbagai aktor berinteraksi di bawah sorotan global. Dalam konteks ini, respons yang disampaikan oleh FIFA dan Qatar berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi, meredam kritik, dan menunjukkan keselarasan dengan ekspektasi komunitas internasional (Regueiro, 2020). Pemaparan mengenai respons aktor ini melengkapi gambaran bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia dalam Piala Dunia Qatar 2022 tidak hanya memunculkan kritik dari aktor internasional, tetapi juga menghasilkan dinamika kebijakan bagi pihak-pihak yang terlibat.